

AKADEMI EKOLOGI

WALHI
YOGYAKARTA

PULIHKAN
JOGJA



Wilayah Kelola Rakyat WALHI Yogyakarta

“Mencari Bentuk Wilayah Kelola Rakyat di Yogyakarta”



Novita Rahma Dhani, Nabilla Hermalia Putri
Amelia Agata Sitanggang, Sevilla Manda Agravania
Lucky Astro Alaiqnes

Wilayah Kelola Rakyat WALHI Yogyakarta

“Mencari Bentuk Wilayah Kelola Rakyat di Yogyakarta”

Novita Rahma Dhani
Nabilla Hermalia Putri
Amelia Agata Sitanggang
Sevilla Manda Agravania
Lucky Astro Alaiqnes

Wilayah Kelola Rakyat WALHI Yogyakarta

“Mencari Bentuk Wilayah Kelola Rakyat di Yogyakarta”

Tim Penulis:

Novita Rahma Dhani
Nabilla Hermalia Putri
Amelia Agata Sitanggang
Sevilla Manda Agravania
Lucky Astro Alaiqnes

Tim Penyelaras:

Dimas P. Ramadhan
Elki Setiyo Hadi

Layout:

Aziz Anshari

Penanggung Jawab:

Gandar Mahojwala

WALHI Yogyakarta

Email : yogyakarta@walhi.or.id
Whatsaap : (+62) 881-2758-593
Instagram : [@pulihkanjogja](https://www.instagram.com/pulihkanjogja)
Website : walhi-jogja.or.id
Alamat : Wonocatur, Banguntapan, Banguntapan,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

WALHI
YOGYAKARTA

Editorial

Salam Adil dan Lestari!

Wilayah Kelola Rakyat di Yogyakarta berbeda dengan Wilayah Kelola Rakyat di daerah lain yang berfokus pada pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara langsung. Di Yogyakarta, sebagai salah satu pusat gerakan organisasi masyarakat sipil, Wilayah Kelola Rakyat dikontekstualisasikan dengan memperkuat dampingan-dampingan organisasi anggota WALHI Yogyakarta, memperkuat dampingan dan komunitas yang didukung. Sebagai sebuah forum, kami mendorong penguatan dampingan lembaga anggota, sehingga dapat mendorong saling dukung, keterlibatan, dan keterkaitan Wilayah Kelola Rakyat yang didukung oleh organisasi anggota dengan WALHI Yogyakarta. Perbedaan dampingan yang tidak hanya berpusat pada sumber daya alam secara langsung memerlukan integrasi sistem tata kelola antara satu wilayah produksi ke wilayah produksi lain. Misal, produk pertanian yang diproduksi oleh KTLP (Kelompok Petani Lansia Produktif), salah satu dampingan SP Kinasih, seharusnya dijual kepada para pekerja rumahan yang membuat olahan makanan, dan begitupun sebaliknya. Artinya, sistem integratif menekankan pentingnya kolaborasi antar wilayah dampingan yang menghubungkan tata kelola, produksi, distribusi, dan konsumsi satu wilayah dampingan dengan wilayah dampingan lain.

Laporan ini membagi tulisan dalam empat bagian utama, yaitu Diskursus Wilayah Kelola Rakyat, Lanskap Wilayah Kelola Rakyat di Yogyakarta, Model Pengelolaan Kelompok Kelola Rakyat, dan Wilayah Kelola Rakyat: Pengalaman dari Yogyakarta. Pada bagian pertama, laporan ini membahas tentang diskursus WKR hingga penurunannya menjadi empat bagian dalam ide WKR yaitu pada tata kuasa, tata kelola, tata produksi, dan tata konsumsi. Tulisan kedua yang berjudul Lanskap Kelola Rakyat di Yogyakarta membahas tentang profil kelompok wilayah kelola rakyat. Pada bagian ketiga yaitu Model Pengelolaan Kelompok Kelola Rakyat merupakan cara-cara yang digunakan oleh kelompok WKR dalam menghimpun dan mengelola sumber daya. Khususnya cara bagaimana kelompok-kelompok tersebut dalam mengelola sistem finansialnya. Bagian keempat yaitu Wilayah Kelola Rakyat: Pengalaman dari Yogyakarta merupakan cerita-cerita mulai pengalaman, kendala, dan tantangan-tantangan, serta mekanisme apa yang digunakan dalam menghadapi setiap tantangan.

Laporan ini merupakan hasil kerjasama antara WALHI Yogyakarta dengan mahasiswa UTY yang menjalankan magang di WALHI Yogyakarta. Hasil laporan ini merupakan karya dari teman-teman magang yang melakukan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, studi pustaka, dan metode wawancara. Wawancara dilakukan dengan lembaga-lembaga anggota dan kelompok dampingan dari lembaga anggota WALHI Yogyakarta.

Atas lahirnya laporan singkat ini, kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang mau terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Kami mengucapkan terimakasih kepada ibu **Umi Asih** dari YASANTI, ibu **Suhartini** dari SP-Kinasih, Pak **Sukiman** dari KAPPALA, dan kak **Arum** dari LSM Kebaya yang mau meluangkan waktu sebagai narasumber, sehingga penelitian ini dapat selesai. Kami mengucapkan terimakasih kepada **Muhamad Nashudin** yang telah meluangkan waktu sebagai teman diskusi dan membantu menyeleraskan naskah awal ini. Kami mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam tulisan ini. Kami juga meyakini tanpa adanya keterlibatan berbagai pihak, maka laporan ini tidak akan pernah sampai ke tangan pembaca.

Gandar Mahojwala, Desember 2023
Direktur Eksekutif WALHI Yogyakarta

Editorial	i
Daftar Isi	iii
Bagian 1: Diskursus Wilayah Kelola Rakyat	1
Bagian 2: Lanskap Wilayah Kelola Rakyat di Yogyakarta	6
YASANTI dan Cerita Perempuan Berdaya	6
SP Kinasih dan Para Petani Lansia Produktif	7
PKBI dan Transpuan Berdaya	9
KAPPALA dan Koperasi Petani	10
Bagian 3: Model Pengelolaan Kelompok	15
Usaha pinjaman alternatif	12
Stimulan/ Modal	12
Sistem modal hibah	13
Sistem Simpanan	13
Bagian 4: Wilayah Kelola Rakyat: Pengalaman dari Yogyakarta	15
Dokumentasi	28

Bagian 1: Diskursus Wilayah Kelola Rakyat

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjadi frasa yang terus dibicarakan, baik oleh para ekonom liberal maupun pemerintah. Akhir-akhir ini, perbincangan ekonomi pertumbuhan juga tak luput dari dinamika Pilpres 2024. Para kandidat memasang target pertumbuhan ekonomi di atas 5%.¹ Bahkan perhelatan Pilpres itu sendiri juga dianggap akan membawa pertumbuhan ekonomi sebesar 5%.²

Sebagai suatu diskursus, pertumbuhan ekonomi (economic growth) tak bisa dilepaskan dari sistem produksi bernama kapitalisme. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi selalu berpilin dengan pasar yang menempatkan modal sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi. Pemodal, melalui skema investasi, mengoperasikan modal untuk mendapat keuntungan dari kerja murah dalam skema UMR (Upah Minimum Regional) dan perputaran ekonomi dalam konsumsi buruh murah. Negara mendapatkan keuntungan dari investasi, pendapatan per kapita buruh, dan sirkulasi konsumsi itu.

Pertumbuhan ekonomi menggaungkan nada kesejahteraan yang diukur melalui Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita.³ PDB berkorelasi dengan hitung-hitungan pendapat negara yang dinilai dari penjumlahan nilai konsumsi, investasi, belanja negara, dan pengurangan ekspor impor. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total nilai pasar (total market value) dari barang dan jasa (*final goods and services*).⁴

Sementara PDB per kapita digunakan untuk mengukur kesejahteraan individu. PDB per kapita dihitung berdasarkan pembagian Produk Nasional Bruto (PNB) dengan jumlah penduduk suatu negara.⁵ Metode yang digunakan adalah perhitungan terhadap jumlah PDB tahun tertentu dengan jumlah populasi penduduk. Kemudian ada pembagian angka Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP) dengan jumlah penduduk. Hasil pembagian nilai PNB dengan jumlah penduduk

-
1. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231026045309-4-483747/capres-cawapres-pasang-target-ekonomi-di-atas-5-yakin-bisa>
 2. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5456235/ekonomi-indonesia-diprediksi-bisa-tumbuh-5-tahun-depan-pilpres-2024-jadi-penopangnya>
 3. Bagas Yusuf Kautsan, dkk., 2022. *Ekonomi Nusantara, Wahana Lingkungan Hidup*. Hlm,
 4. *Ibid.*, hlm, 25.
 5. *Ibid.*, hlm, 13.

disebut sebagai pendapatan rata-rata nasional. Selain itu, pendapatan per kapita juga bisa dihitung dari pendapatan usia produktif di suatu wilayah dibagi jumlah populasi penduduknya

Mitos kesejahteraan yang digaungkan oleh diskursus pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) mendorong penguasaan atau dominasi segelintir orang (atau organisasi ekonomi) terhadap banyak orang. Penggunaan PDB dan PDB per kapita, abai terhadap aspek non ekonomi seperti aspek ekologi dan sosial. Kedua aspek ini dinegasikan dan sama sekali tidak diperhitungkan dalam merumuskan kriteria kesejahteraan.⁶

Merujuk pada hegemoni diskursus pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), Walhi menawarkan satu diskursus tandingan yang disebut “ekonomi nusantara.” Diskursus ekonomi nusantara berangkat dari dialog degrowth dan commoning yang lebih dulu populer sebagai gerakan tanding pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Ekonomi nusantara mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam kehidupan manusia yang terhubung secara dialektis; yang satu tidak bisa hidup tanpa yang lain: saling dibentuk dan membentuk.

Praktik ekonomi nusantara mendasarkan pada empat nilai pengikat yakni (1) hubungan kejayaan masa lalu dengan kondisi saat ini; (2) hubungan praktik ekonomi lokal dengan lanskap ekologis di sekitarnya; (3) integrasi praktik ekonomi dengan aspek sosial dan lingkungan⁷; dan (4) memiliki dimensi pemulihan atas kondisi krisis sosial-ekologis.

Diskursus ekonomi nusantara adalah bagian dari konsep Wilayah Kelola Rakyat (WKR), yaitu satu sistem pengelolaan wilayah tertentu yang integratif dan partisipatif. Baik dalam hal tata kuasa, kelola, produksi, dan konsumsi. Prinsip penyelenggaraannya senantiasa memperhatikan daya dukung ekologis sebagai pendukung kehidupan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemakmuran, keadilan, dan keberlanjutan makhluk hidup (manusia dan non-manusia). Masing-masing tata kelola ini saling terkait guna memastikan daulat rakyat terhadap sumber daya alam. Pada proses tata kuasa, tentu saja rakyat harus memperoleh pengakuan dan perlindungan. Selanjutnya, pada tata kelola, rakyat men-

6. Ibid., hlm, 13.

7. Ibid.

erapkan model kelola yang lestari berbasis nilai dan kearifan tertentu. Adapun dalam tata konsumsi, rakyat melakukan aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhannya. Sementara dalam tata produksi, rakyat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas tertentu. Namun, produksi komoditas tersebut tidak semata untuk kebutuhan pasar.⁸

Ranah Wilayah Kelola Rakyat memuat empat hal yang meliputi tata kuasa, tata kelola, tata produksi, dan tata konsumsi. Tata Kuasa adalah sistem penguasaan wilayah kelola rakyat baik dalam relasinya secara struktural (dengan pemerintah, korporasi) maupun secara horizontal (antar masyarakat). Tata kuasa ini sangat terkait erat dengan aspek tenurial dimana sering kali terjadi tumpang tindih klaim atas suatu wilayah.

Indikator proses advokasi atas wilayah kelola rakyat pada ranah ini dibatasi pada:

- Proses pengorganisasian tahap awal di tingkat internal masih pada upaya memberikan pemahaman hak serta konsolidasi yang dilakukan secara parsial.
- Posisi jaringan (eksternal) masih dominan dalam mempengaruhi pengambil kebijakan.
- Masih fokus bergerak pada perjuangan untuk mendapatkan pengakuan hak tenur/ klaim atas wilayah kelolanya.

Tata Kelola adalah kaidah atau sistem untuk menjalankan dan mengendalikan atas ruang/wilayah kelola rakyat baik melalui tatanan nilai adat/lokal, maupun melalui tatanan aturan hukum formal yang telah disinergikan dengan nilai-nilai adat/lokal. Dalam konteks keberlanjutan ruang kehidupan ini maka dalam penata kelolaan wilayah kelola rakyat harus memenuhi kaidah keseimbangan ekosistem dan jaminan keberlanjutan.

Indikator pada proses advokasi pada sebagai berikut:

- Pengakuan hak tenur (penguasaan dan atau pengelolaan) sudah

8. Ibid., hlm, 55.

mencapai kesepakatan dan kemufakatan baik secara *defacto* dan/ atau *dejure*.

- Pengorganisasian sudah lebih inklusif, dalam arti seluruh komponen masyarakat sudah terlibat dan atau dilibatkan.
- Sudah ada proses untuk menata wilayah kelolanya berdasarkan tata nilai adat/lokal dan atau tata aturan formal yang disinergikan dengan nilai adat/lokal.
- Fungsi kerja internal masyarakat dan jaringan (eksternal) sudah semakin proporsional.

Tata produksi adalah kaidah atau aturan dalam proses mengeluarkan atau menghasilkan suatu produk (sandang, pangan, papan, jasa dll) yang berbasis pada potensi yang ada di wilayah kelola rakyat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan warganya. Dalam prosesnya, tata produksi ditekankan untuk tidak meningkatkan resiko terhadap wilayah kelolanya, proses produksi harus melihat daya dukung lingkungan; tidak memunculkan masalah baru.

Tata produksi mengatur bagaimana relasi komunitas (produsen) dengan pihak luar (konsumen). Indikator pada proses pengorganisasian pada ranah ini telah memenuhi beberapa hal berikut:

- Terdapat komoditas potensial yang mulai diproduksi dari wilayah kelolanya.
- Sudah ada kelembagaan yang menangani urusan tata produksi baik untuk ke dalam maupun ke luar wilayah komunitas.
- Pengorganisasian sudah mulai ditingkatkan pada upaya peningkatan kesejahteraan warga.

Tata konsumsi merupakan kaidah atau sistem yang mengatur pola pemanfaatan/pemakaian produk dari wilayah kelolanya untuk kepentingan keberlanjutan kehidupan warga. Dalam tata konsumsi, ditekankan agar adanya pemahaman arti nilai dan fungsi ekosistem secara komprehensif sehingga dapat tercipta kultur atau budaya saling mengisi dan

melindungi antara masyarakat dengan lingkungannya.

Indikator pada proses pengorganisasian pada ranah ini sebagai berikut:

- Kelembagaan organisasi rakyat sudah berjalan mandiri.
- Pemanfaatan wilayah kelola sudah menyentuh aspek ekonomi, ekologi dan sosial /etik secara berkelanjutan dan merata.
- Sudah ada dukungan para pihak dalam berbagai bentuk yang memperkuat eksistensi masyarakat dan wilayah kelolanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model tata kelola, tata kuasa, dan tata produksi, dan tata konsumsi Wilayah Kelola Rakyat Walhi Yogyakarta yang digali dari daerah dampingan lembaga anggota. Lalu, bagaimana Wilayah Kelola Rakyat di Yogyakarta?

Bagian 2: Lanskap Wilayah Kelola Rakyat di Yogyakarta

Wilayah Kelola Rakyat menjadi bagian dari fokus kerja-kerja Walhi Yogyakarta. Kerja-kerja itu dilakukan dengan model pendampingan kepada komunitas marginal. Praktiknya, model pendampingan itu dikerjakan oleh para anggota Walhi Yogyakarta, seperti SP Kinasih, YASANTI, PKBI, dan KAPPALA. Keempat organisasi itu memiliki corak dan model pendampingan masing-masing sesuai dengan karakteristik dampungannya. Misalnya, YASANTI yang memiliki dampungan ibu-ibu kuli gendong dan penjahit, SP Kinasih mendampingi Kelompok Tani Lansia Produktif (KTLP) di Ledhok Timoho, PKBI mendampingi UMKM yang digerakkan oleh komunitas transpuan (LSM Kebaya), dan KAPPALA melakukan advokasi petani.

Model penerapan Wilayah Kelola Rakyat di Yogyakarta lebih luas dan bersifat pemberdayaan ekonomi kreatif dibandingkan Wilayah Kelola Rakyat di daerah lain, seperti UMKM Kebaya, ibu-ibu kuli gendong, dan para ibu-ibu penjahit. Praktis hanya Kelompok Tani Lansia Produktif (KTLP) yang didampingi SP Kinasih dan Petani Kopi di kaki gunung merapi yang di damping KAPPALA menjadi dua wilayah yang berhubungan dengan lingkungan secara langsung.

Perbedaan model Wilayah Kelola Rakyat di Yogyakarta dan Wilayah Kelola Rakyat di daerah lain bukanlah suatu persoalan yang gawat. Hal Ini justru harus ditempatkan sebagai penguat konsepsi Wilayah kelola Rakyat (WKR) Walhi, sebagaimana disebut Milner (2009) bahwa “kondisi sosial dipengaruhi oleh materialitas.”⁹

YASANTI dan Cerita Perempuan Berdaya

YASANTI adalah anggota Walhi Yogyakarta yang berfokus pada pendampingan pekerja perempuan rumahan dan ibu-ibu buruh gendong. Kerja-kerja Yasanti bergerak di sekitar tiga elemen, seperti pendidikan dan kesadaran, organisasi, dan advokasi.

9. Milner dalam Kooy, J., dkk. 2008. “Technologies of Government: Constituting Subjectivities, Spaces, and Infrastructures in Colonial and Contemporary Jakarta.” *International Journal of Urban and Regional Research* 32(2):375–91.

Pendidikan dan kesadaran mengarah pada pendidikan tentang hak-hak perempuan dan struktur organisasi untuk membangun jaringan. Selain itu, pendidikan terkait literasi, *public speaking*, dan strategi-strategi advokasi juga diberikan. Pendidikan dan penyadaran itu menjadi langkah untuk menguatkan organisasi perempuan sebagai alat untuk meningkatkan kapasitas pada komunitas dan berbagai aktifitas lainnya. Pada gilirannya, dua elemen itu berujung ada advokasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan isu-isu pekerja melalui lobbying, publikasi di sosial media dan berbagai poster, kampanye, kerjasama dengan media, serta pembangunan jaringan dengan NGO (*Non-Government Organization*) dan lembaga riset lainnya.¹⁰

YASANTI memiliki fokus pada pendampingan perempuan pekerja dan perempuan yang terpinggirkan dalam aspek pendidikan dan ekonomi. Yasanti menginisiasi pendampingan pertama dengan mengedepankan pemenuhan terhadap kebutuhan pangan komunitas dampingan. YASANTI, melalui pelatihan yang intensif, menciptakan variasi usaha produktif di antara anggota seperti PAPERJA. PAPERJA merupakan kelompok perempuan yang memproduksi berbagai produk. PAPERJA merupakan anggota dampingan YASANTI yang berisi perempuan dengan berbagai aktivitas ekonomi mulai dari pedagang sayur, buah, sembako, hingga penjual makanan khas. Komunitas ini berhasil menghasilkan produk seperti kain *shibori*, kain *ecoprint*, serta kuliner dengan keunikannya masing-masing. Keahlian ganda anggota PAPERJA, seperti dalam usaha *ecoprint* dan kuliner, memberikan sinergi yang kuat saat pameran, menciptakan kolaborasi yang mendukung di antara produk-produk komunitas. Selain itu, produk khas seperti kain *shibori* dan *ecoprint* menambah keberagaman portofolio usaha YASANTI.

SP Kinasih dan Para Petani Lansia Produktif

Solidaritas Perempuan Kinasih merupakan bagian dari sebelas komunitas Solidaritas Perempuan di sembilan provinsi di Indonesia. Solidaritas Perempuan Kinasih berfokus pada advokasi isu kedaulatan perempuan, melawan perdagangan bebas, investasi dan tanah yakni terkait isu penggusuran dan kedaulatan perempuan atas seksualitas, terkait isu

10. YASANTI - Indonesia Inklusi, diakses 20/12/2023.

keberagaman dan toleransi. Visi utama SP Kinasih adalah terciptanya tatanan sosial yang egaliter dan berwawasan ekologi dengan sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang lebih simetris, di mana keduanya dapat berbagi akses terhadap dan kontrol atas sumber daya sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil.¹¹

Dalam gerakannya, SP Kinasih berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui pengetahuan dan dorongan berwirausaha. Salah satu pemberdayaan yang dilakukan SP Kinasih adalah pelatihan tradisional dan semi-modern untuk memastikan keberlanjutan lingkungan seiring dengan proses produksi produk komunitas dampingan.

Pada isu pertanian, SP Kinasih juga melakukan pendampingan komunitas petani, seperti Kelompok Petani Lansia Produktif (KTLP), yang berlokasi di Ledhok Timoho. SP Kinasih berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan Kelompok Tani Lansia Produktif (KTLP) dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan menjual hasil pertaniannya.

Beragam kerjasama difasilitasi SP Kinasih melalui *lobbying* dengan berbagai dinas salah satunya adalah Dinas Pertanian. Hasilnya, kelompok KTLP di Ledok Timoho berhasil meningkatkan produktivitas panen dan penjualan pisang ambon. Selain itu, Dinas Pertanian juga memberikan dukungan yang signifikan bagi KTLP melalui bermacam program bantuan pengembangan, seperti budidaya nila, lele, dan pemberian kambing. Dukungan dari dinas pertanian, terutama melalui pembentukan KTLP Ledhok Timoho memberikan dukungan signifikan kepada kelompok-kelompok tersebut. Ini meningkatkan keberlanjutan program dan memberikan dampak sosial positif.

Selain KTLP, SP Kinasih juga berkontribusi dalam memberikan pengetahuan dan peluang pendapatan kepada perempuan di komunitas yang tidak hanya terbatas pada simpan-pinjam PKK, tetapi juga menghasilkan pendapatan melalui kegiatan memasak dan penjualan produk segar, seperti alpukat dan minyak kelapa. Produk olahan yang dihasilkan komunitas dari ketela dan pisang berupa sale pisang, donat, dan brownies, menciptakan nilai tambah dari bahan mentah tersebut. Diversifikasi

11. Tentang Kami - Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta, diakses 20/12/2023.

produk organik seperti keripik talas, keripik regedeg, beras, dan tempe menunjukkan ketahanan dan keberagaman usaha komunitas SP Kinasih. Produk-produk ini bahkan mencapai pasar nasional dengan pengiriman hingga ke Nusa Tenggara Timur.

Para petani anggota binaan SP Kinasih sering mendapati kegagalan panen saat bercocok tanam. Namun, dengan bekal ilmu tanam yang mumpuni petani-petani tersebut dapat menanggulangi masalah yang dihadapi. Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani, Ibu-ibu anggota SP Kinasih mendirikan FES (*Feminist Economy Solidarity*) untuk memasarkan produk mereka melalui angkringan setiap Sabtu dan berpartisipasi dalam pameran.

Faktor kendala dan hambatan tersebut membuat lembaga dampingan dapat mengevaluasi mana usaha yang patut didukung dan mana usaha yang perlu diberi bimbingan lebih lanjut. Bentuk evaluasi kinerja dapat berupa sosialisasi dalam berwirausaha, pelatihan dengan *expert* suatu bidang usaha, bantuan pengadaan dana alternatif seperti simpan-pinjam untuk kebutuhan usaha dan lain sebagainya.

PKBI dan Transpuan Berdaya

LSM Kebaya merupakan wadah pemberdayaan transpuan yang didampingi oleh PKBI. LSM Kebaya sebagai kelompok minoritas melakukan berbagai advokasi kepada pemerintah, seperti mengupayakan pembuatan KTP bagi teman-teman transpuan. Advokasi ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja dan Bali.

PKBI, melalui pembentukan LSM Kebaya, menunjukkan respons yang serius terhadap tantangan kesehatan yang dihadapi oleh para transpuan yang mengidap HIV. Dengan melibatkan LSM dan pemerintah daerah, LSM Kebaya berhasil melakukan penjangkauan yang efektif dengan pertemuan *face-to-face*, mengumpulkan data dari 228 transpuan di tiga kabupaten. Komitmen PKBI dalam menciptakan wilayah kelola rakyat yang responsif dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kesehatan

masyarakat yang rentan menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan partisipatif yang berkelanjutan.

Berbagai program telah dirancang untuk memperkuat perekonomian lokal dan memberdayakan kelompok-kelompok tertentu. LSM Kebaya yang merupakan dampingan PKBI memberikan dukungan kepada UMKM transpuan. Selain itu LSM kebaya juga memberikan peningkatan kapasitas seperti pelatihan, pemberian modal usaha, serta bantuan administratif. Pelatihan-pelatihan itu dilakukan LSM Kebaya melalui kerjasama dengan dinas koperasi. Tujuan utama program-program itu adalah penciptaan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan kemudahan akses pasar bagi UMKM yang sudah terdaftar.

KAPPALA dan Koperasi Petani

KAPPALA Indonesia adalah anggota Walhi Yogyakarta yang percaya bahwa komunitas harus mampu mengelola sumberdayanya secara berkelanjutan, demokratis, dan harmonis dengan alam. Oleh karena itu KAPPALA mempunyai misi (1) meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumberdayanya secara demokratis, harmonis dengan alam, (2) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam manajemen bencana berbasis komunitas, (3) serta mengupayakan agar pengelolaan lingkungan tidak menjadi pemicu munculnya bencana dan risiko baru.

Berbagai persoalan yang menjadi fokus KAPPALA antara lain; (1) masalah lingkungan dan pengelolaan sumberdaya alam, bencana, pengkajian, dan pembelaan lingkungan, (2) pendampingan dan penguatan masyarakat, (3) serta pendidikan cinta alam dan lingkungan. Aktivitas tersebut dilakukan dalam payung (1) program manajemen bencana, (2) program keamanan pangan, dan air, serta (3) program pendidikan lingkungan dan konservasi alam.

KAPPALA mendampingi para petani kopi di lereng Merapi. Pendampingan itu telah melahirkan koperasi bagi para petani di lereng Merapi. Salah satu dampingan Kappala yang berada di wilayah Merapi, adalah Kelompok Petani Ngudi Rukun. Mereka mempunyai kelompok koperasi bernama Koperasi Ngudi Rukun. Kelompok petani Ngudi Rukun sudah didirikan sejak tahun 2004. Sementara koperasi Ngudi Rukun didirikan sejak tahun 2011. Ide koperasi muncul guna menanggulangi gunung

merapi meletus di masa depan. Koperasi muncul lantaran, kewaspadaan warga. Dana tersebut rencananya dikumpulkan dengan harapan apabila gunung merapi meletus warga dapat memitigasi secara mandiri.

Wilayah tempat mereka tinggal merupakan wilayah yang paling berdampak apabila gunung Merapi meletus. Awalnya koperasi mereka dibangun untuk biaya memitigasi ketika gunung merapi meletus. Gunung Merapi tidak pernah meletus dan akhirnya dana mereka terus meningkat, sehingga jumlah tabungan kelompok tersebut terus meningkat. Tabungan yang terus meningkat tersebut dimanfaatkan dan diputar kembali untuk mengembangkan ekonomi berbasis koperasi.

Bagian 3: Model Pengelolaan Kelompok

Guna menjalankan aktifitas ekonominya, setiap lembaga memerlukan mekanisme tertentu untuk mendapatkan modal. Dari hasil riset menunjukkan bahwa, terdapat beberapa bentuk model pengelolaan finansial guna mempertahankan dan memutar usaha kreatifnya. Peran lembaga dampingan wilayah kelola rakyat memiliki andil besar atas keberlangsungan berjalannya usaha. Setiap dampingan membutuhkan “bekal” untuk memulai kinerja. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa model bantuan dalam pendampingan seperti:

Usaha pinjaman alternatif

Di wilayah perkotaan seperti Pasar Beringharjo dan Malioboro, para anggota lembaga dampingan memiliki pekerjaan tersendiri selain berdagang produk hasil wilayah kelola rakyat. Namun, tidak ada jaminan pasti akan penghasilan yang didapat. Melihat kondisi tersebut, lembaga dampingan membuat sebuah alternatif usaha pinjaman berupa simpan-pinjam. Sistem ini diperuntukkan untuk siapapun yang memiliki niat untuk membuka usaha, baik anggota lembaga dampingan maupun bukan anggota lembaga dampingan.

Dalam prakteknya, anggota yang melakukan transaksi usaha simpan pinjam harus mengembalikan modal atau pinjaman dengan jumlah yang sama ke pihak yang berwenang. Usaha pinjaman alternatif menjadi peluang supaya usaha anggota bisa terus berjalan dan berkembang tanpa hambatan finansial.

Stimulan/ Modal

Lembaga dampingan tidak membiayai anggota secara langsung, melainkan membuat anggota dampingan membentuk sebuah kelompok untuk bekerja sama menyediakan modal yang dapat digunakan untuk usaha bersama. Anggota memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan kembali uang yang digunakan ke pihak yang berwenang.

Lembaga dampingan menjadi sistem pendukung bagi anggota untuk menjadi wadah fasilitator, memberi motivasi serta pelatihan untuk pengembangan kemampuan. Upaya ini untuk menumbuhkan keberdayaan dan kemandirian anggota dalam berwirausaha.

Anggaran awal dapat berupa fasilitas kepelatihan dan charity (dalam bentuk sembako). Sayangnya, para anggota lebih memilih bantuan sembako daripada pelatihan untuk menunjang skill berwirausaha. Lembaga dampingan berharap para anggota memilih anggaran dalam bentuk pelatihan yang lebih sustainable sehingga dapat membantu keberlanjutan dalam pengelolaan wilayah kelola rakyat di masa depan.

Sistem modal hibah

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1666 hibah adalah suatu pemberian oleh seseorang yang masih hidup kepada orang lain secara cuma cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Sistem bantuan hibah mengutamakan para anggota kelompok dampingan seperti petani, perintis UMKM dan pekerja buruh gendong yang sangat memerlukan bantuan pendanaan, sehingga pembagian hibah pun dilakukan secara terbatas. Penerima tidak perlu mengembalikan modal tersebut. Lembaga dampingan hanya melakukan monitoring usaha yang dilakukan oleh auditor. Terdapat aturan ketat terkait regulasi pembagian hibah seperti pemberhentian pemberian hibah untuk usaha anggota yang berhenti di tengah usaha/menyerah, sebaliknya jika usaha anggota mengalami kemajuan dan perkembangan yang signifikan maka dapat diberi penambahan modal untuk keberlanjutan usaha.

Sistem Simpanan

Anggota usaha dapat mengumpulkan modal bersama dengan membuat kas komunitas, simpanan wajib dan simpanan pokok secara bersama-sama. Pengelolaan kas ini berfungsi sebagai alternatif pendanaan yang digunakan untuk anggota usaha. Hasil setiap penjualan produk usaha bersama dapat dimasukkan dalam kantong kas komunitas. Nomi-

nal simpanan pokok dan simpanan wajib dapat diatur sesuai kebutuhan dan kemampuan anggota komunitas agar tidak saling memberatkan satu sama lain.

Melalui upaya bantuan ini, lembaga dampingan berharap para anggota dapat memaksimalkan penuh kemampuan mereka dalam berwirusaha sehingga keberhasilan usaha anggota dampingan dapat menjadi acuan agar pendanaan dapat terus berlangsung dan dapat didukung oleh lembaga dampingan.

Bagian 4: Wilayah Kelola Rakyat: Pengalaman dari Yogyakarta

Sebagaimana disebutkan di awal, Wilayah Kelola Rakyat memuat empat hal penting berupa tata kuasa, tata kelola, tata produksi, dan tata konsumsi yang saling terintegrasi satu sama lain. Di Yogyakarta, tata kuasa dijalankan melalui pelibatan pemerintah daerah, lembaga-lembaga pemerintahan, dan masyarakat setempat. Pelibatan itu dimaksudkan agar pengambilan kebijakan selalu melibatkan masyarakat dampingan.

Hasil wawancara dengan beberapa organisasi seperti Yasanti, SP-Kinasih, PKBI, dan KAPPALA menunjukkan bahwa hubungan antar pihak sangat dibutuhkan. Setiap lembaga bersama dampingannya mempunyai pola hubungan yang berbeda. Misalnya seperti Yasanti membangun hubungan dengan mengikuti berbagai event yang diadakan oleh dinas, maupun jajaran pemerintah yang lain. Yasanti melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, bahkan Dinas Perdagangan yang mengadakan lomba dan bazar untuk menjual produk-produk yang diproduksi oleh anggotanya. Tujuan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh dinas-dinas terkait adalah memberikan motivasi kepada anggotanya agar lebih bersemangat dalam meningkatkan kapasitas dan keterampilan.

Anggota Walhi, seperti Yasanti, SP-Kinasih, PKBI melalui LSM Kebaya, dan KAPPALA mengusahakan tata kelola yang adil dengan mekanisme advokasi kebijakan kepada dinas terkait. Misalnya petani, terkait dengan perairan dan tanah kas desa, sehingga masalah tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Selain itu tata kuasa juga berhubungan dengan masalah yang bersifat admistratif. Misalnya, kebutuhan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Dinas Koperasi dan UMKM agar komunitas dapat mengikuti pelatihan UMKM sebagai bentuk peningkatan kapasitas komunitas.

Pada konteks Wilayah Kelola Rakyat di Yogyakarta, partisipasi masyarakat mencerminkan tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan. Partisipasi menjadi bagian penting dalam tata kelola yang dilakukan oleh lembaga/komunitas. Misalnya Yasanti dan PKBI yang berfokus pada isu kesetaraan gender dan kemandirian kelompok. Berbagai bentuk pelatihan diselenggarakan sesuai dengan minat masing-masing anggota dan dikerjakan dengan prinsip kesetaraan; setiap anggota berhak untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan.

Masalah-masalah yang dihadapi anggota diselesaikan dengan memberikan masukan pembacaan atas pasar. Contoh masalah yang sering dihadapi komunitas adalah produk yang tidak mudah laku di pasar, tidak berkomitmen pada konsep penjualan (bergonta-ganti konsep penjualan) dan lain sebagainya. Tidak jarang, para anggota usaha menyerah dan meninggalkan usaha. LSM Kebaya memfasilitasi persoalan itu dengan memberikan motivasi agar melakukan inovasi produk usahanya.

Dalam konteks struktur kepemimpinan dan tata kuasa wilayah kelola rakyat, kelompok komunitas umumnya memiliki seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan di lapangan. Pemimpin tersebut memiliki peran kunci sebagai fasilitator, yang tidak hanya menjadi wadah bagi anggota kelompok, tetapi juga berperan sebagai pemberi motivasi dan dorongan untuk anggota yang berwirausaha. Tugas pemimpin mencakup pemantauan, dukungan terhadap kelompok usaha anggota, serta penyelenggaraan pelatihan rutin.

Struktur kepemimpinan ini menjadi penting untuk mencapai tujuan kelompok atau komunitas. Pemimpin bertanggung jawab atas pengadaan bantuan usaha bagi anggota yang berminat, mengorganisir pelatihan reguler, dan memastikan setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha mereka.

Proses tata kuasa menjadi bentuk pengorganisasian komunitas dan upaya pendidikan politik bagi komunitas. Pendidikan politik ini bertujuan agar komunitas dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan dan mendapat tempat untuk berkembang. Hal itu selaras dengan salah

satu tujuan Wilayah Kelola Rakyat, yaitu pengelolaan potensi masyarakat di suatu wilayah yang tidak dapat dilepaskan dari partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan.

Berdasarkan observasi di lapangan, Wilayah Kelola Rakyat di Yogyakarta memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Produk dari Wilayah Kelola Rakyat berkontribusi secara ekonomi dan membantu masyarakat untuk mengelola sumber daya alam, memenuhi kebutuhan hidup, dan meningkatkan kualitas kehidupan.

Dalam kerjanya, komunitas memiliki agenda pertemuan rutin yang berfungsi sebagai forum evaluasi oleh lembaga dampingan terhadap usaha yang dilakukan anggota. Bentuk penilaian dan peninjauan tersebut berupa seleksi antara usaha yang berkembang dan usaha yang terhambat. Evaluasi memiliki peran penting untuk keberlangsungan usaha anggota. Melalui evaluasi, lembaga dampingan dapat memberikan dukungan untuk usaha yang mengalami perkembangan sedangkan usaha yang tidak berkembang akan terdegradasi. Degradasi adalah keadaan dimana usaha anggota mengalami kemunduran dan berpotensi untuk berhenti secara sepihak dari anggota yang mengelola. Degradasi terjadi sebab penurunan komitmen dan produktivitas anggota usaha dalam menjalankan usaha.

Pada konteks tata kelola, kegiatan pelatihan memiliki peran strategis dalam pengembangan anggota komunitas, tidak hanya terbatas pada pengelolaan ruang tetapi juga pengelolaan tenaga. Pelatihan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif anggota dari berbagai latar belakang. Komunitas secara konsisten menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan daya saing dan eksistensi anggotanya. Proses pelatihan yang melibatkan berbagai kegiatan, termasuk asesmen, pelatihan pembukuan, dan pengorganisasian, bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan kelompok dampingan.

Tata kelola menjadi langkah awal untuk membangun partisipasi masyarakat dampingan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Lembaga dampingan seperti LSM Kebaya dan Yasanti mem-

buat sebuah forum group diskusi (FGD) saat pertemuan rutin berlangsung, dimana forum ini berfungsi untuk menjadi wadah penyaluran cerita, motivasi, keberhasilan para anggota sehingga dapat menginspirasi dan memotivasi rekan anggota usaha yang lain. Tidak hanya itu, anggota forum juga dapat menyampaikan persoalan dalam organisasi bahkan persoalan pribadi yang mempengaruhi kinerja usaha.

Penginisiasian kelompok-kelompok ini mencerminkan langkah awal yang penting dalam tata kelola Wilayah Kelola Rakyat di Yogyakarta, di mana partisipasi masyarakat dan respons terhadap kebutuhan lokal menjadi fokus utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Tata kelola di Wilayah Kelola Rakyat Yogyakarta memuat masalah pengelolaan usaha dan komunitas.

Di dalam konteks WKR ini, lembaga pendamping dan dampingan bekerjasama tidak hanya pada persoalan advokasi kebijakan saja tetapi juga di dalam pengelolaan produksi. Para komunitas dampingan bekerja sama juga dengan masyarakat luas agar hasil produk mereka dapat dibeli. Selain itu, jaringan di masyarakat juga mempermudah UMKM dalam melakukan promosinya. Contohnya di Yasanti, anggota yang memiliki kemampuan teknologi dapat digunakan untuk bekerja sama secara online dengan INB dan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) untuk mendapatkan hak paten berjualan.

Para anggota kelompok dampingan dari Yasanti, LSM Kebaya, Kappala dan juga SP Kinasih saling membantu dan berbagi pengetahuan satu sama lain. Misalnya pada saat ada pelatihan, anggota yang mendapat pelatihan akan menyampaikan hasil yang didapatkan dari pelatihan. Jadi, semua anggota bisa berusaha dan memiliki ide untuk membuat sesuatu yang baru. Selain itu mereka juga biasanya memiliki jaringan di luar kota seperti di Jakarta yang akan membantu mereka dalam penjualan produk serta berpartisipasi dalam berbagai acara seperti bazar, untuk memperkenalkan produk-produknya.

Dalam konteks Tata Produksi, produk-produk yang dihasilkan dalam

tata produksi di berbagai komunitas di wilayah Yogyakarta mencerminkan keberagaman usaha dan kreativitas masyarakat setempat. Lembaga seperti YASANTI, dan PKBI merupakan lembaga anggota yang berada di wilayah perkotaan. Potensi yang ada di konteks Yogyakarta adalah pariwisata. Ide YASANTI adalah pemberdayaan perempuan. Organisasi dampingan YASANTI adalah ibu-ibu pekerja rumah tangga, ibu-ibu jamu gendong, dan perempuan-perempuan pekerja informal. Advokasi yang digunakan oleh YASANTI salah satunya adalah mengajak perempuan-perempuan yang bekerja secara informal tersebut membuat kelompok ekonomi kreatif, dengan memanfaatkan apa yang ada di wilayah Yogyakarta. Karena potensi yang ada merupakan pariwisata, maka perempuan-perempuan pekerja informal yang menjadi dampingan YASANTI menangkap peluang tersebut dengan mengajak anggotanya terus berinovasi dan memacu diri untuk terus belajar, melalui pelatihan-pelatihan. Pariwisata merupakan sektor perekonomian yang tidak sustain. Namun, dengan cara yang sesuai dan inklusif terdapat peluang yang dapat digunakan. Seperti yang dilakukan oleh anggota YASANTI, mereka memanfaatkan peluang tersebut dengan membuat produk-produk yang dapat dijadikan cinderamata seperti kain shibori, ecoprint, kuliner tradisional yang menjadi ciri khas Yogyakarta, dan berbagai produk-produk kreatif lainnya.

Perempuan yang menjadi anggota YASANTI, tidak benar-benar bergantung hidupnya pada pariwisata, melainkan menangkap peluang tersebut sebagai tambahan penghasilan di luar penghasilan utama setiap anggota. YASANTI lebih menekankan bagaimana anggotanya dapat mempunyai keterampilan yang mandiri dengan tujuan peningkatan taraf kehidupan. Upaya yang dilakukan misalnya adalah mengikuti pameran yang dilakukan oleh berbagai pihak. Melalui pameran-pameran tersebut para anggota dapat memperkenalkan produk-produk yang menjadi ciri khas mereka. Tidak hanya produk, melalui pameran kelompok-kelompok dampingan YASANTI juga dapat menambah jaringan dan pengetahuannya.

Kelompok lain yang tidak jauh berbeda adalah LSM Kebaya. LSM

Kebaya merupakan kelompok dampingan PKBI. Anggotanya merupakan individu yang terdiri dari transpuan. Di tengah berbagai stereotype yang menempel, mereka terus mengembangkan potensi-potensi yang ada. LSM Kebaya melakukan advokasi agar para anggotanya dapat sustain dan mandiri. Mereka membuat produk Shibori dan kain ecoprint. Tidak berbeda jauh dengan YASANTI, anggota LSM Kebaya juga merupakan kelompok-kelompok rentan. Mereka juga berada di wilayah perkotaan, sehingga potensi yang ada adalah pariwisata. LSM Kebaya, memproduksi produk-produk kerajinan seperti kain Shibori dan ecoprint. Namun, berbeda dengan YASANTI kelompok LSM Kebaya mempunyai tantangan lain, yaitu terkait identitasnya. Salah satu keberhasilan LSM Kebaya adalah melakukan pengorganisasian dengan kelompok transpuan di wilayah lain sehingga mereka mempunyai hak yang sama. Kelompok LSM Kebaya melakukan advokasi dengan memperjuangkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga mereka dapat menjalankan usaha-usahanya, karena dengan mempunyai KTP mereka mendapat Nomor Izin Berusaha (NIB) guna menunjang usaha-usaha mereka. Tantangan lainnya adalah penjualan yang tidak selalu konsisten. Permasalahan tersebut diatasi dengan menggunakan strategi inovatif dengan aktif mengikuti pameran dan bazar. Meskipun tujuan utama partisipasi bukan hanya penjualan, kehadiran mereka bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengenalan produk di kalangan masyarakat.

Ide utama WKR adalah melihat potensi-potensi yang ada di wilayah kelompok-kelompok tersebut berada. Berbeda dengan dua organisasi di atas, terdapat kelompok dampingan KAPPALA dan SP-Kinnasih yang mempunyai potensi berbeda. Potensi yang ada di wilayah dampingan Kappala adalah bentangan alam yang menunjang ekonomi berbasis pertanian.

Di KAPPALA, langkah-langkah sederhana seperti produksi kopi dan pendirian koperasi menciptakan dampak yang signifikan dalam tata produksi komunitas. Koperasi sebagai wadah usaha bersama dan perpustakaan sebagai pusat informasi menunjukkan bahwa tata produksi tidak hanya terbatas pada aspek fisik seperti pengolahan kopi, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan pendidikan. Produk-produk ini

mencerminkan semangat kolaboratif dan perhatian terhadap pendidikan di komunitas KAPPALA. Selain KAPPALA, terdapat kelompok dampingan SP-Kinnasih yaitu KTLP dan kelompok petani perempuan “Kharisma” yang membuat produk-produk unggulan, seperti hasil pertanian dan hasil olahan pertanian organik yang ramah lingkungan. Komunitas-komunitas tersebut menanamkan variasi dalam pelatihan, termasuk mengundang ahli dari luar komunitas untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam. Dalam upaya meningkatkan ketahanan komunitas, seperti yang dilakukan kelompok petani perempuan dengan pelatihan tanaman dan budidaya lele, komunitas-komunitas di atas menjalin kerja sama yang kuat dan berkomitmen untuk keberhasilan anggotanya.

Proses produksi tidak hanya berbicara tentang keberagaman kegiatan ekonomi, melainkan juga upaya inklusivitas, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan yang dijalankan oleh masyarakat lokal. Misalnya YASANTI, fokus utama dalam tata produksi adalah pembuatan batik ecoprint, sebuah kegiatan sentral yang dikembangkan secara mandiri. Anggota PAPERJA tidak hanya memiliki keahlian dalam usaha ecoprint, tetapi juga memiliki kemampuan dalam bidang kuliner, menciptakan sinergi yang kuat antar anggota dan mendukung keberlanjutan produksi. Prinsip inklusivitas dan berbagi pengetahuan dalam pelatihan juga menciptakan ruang untuk kreativitas individu dan inovasi. YASANTI berharap dapat berbagi inspirasi dan praktik terbaik dalam tata produksi yang berkelanjutan dan inklusif.

Di LSM Kebaya, istilah "kubah-kebaya" mengacu pada kelompok usaha bersama yang berperan sebagai penampung hasil karya anggota untuk dijual. Meskipun proses produksi produk tidak dilakukan langsung oleh kubah-kebaya, kelompok ini berfungsi sebagai wadah untuk mengumpulkan karya dari anggota. Pemimpin komunitas, Arum, menekankan kualitas produk lebih dari pada kuantitas, dan LSM Kebaya juga terlibat dalam kegiatan sosial, seperti pelatihan tentang kain *shibori*. Meskipun dihadapkan pada tantangan ramah lingkungan karena penggunaan kain produk pabrik, LSM Kebaya berharap dapat mengembangkan praktik produksi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Komunitas SP Kinasih menunjukkan upaya kuat dalam menjalankan proses produksi yang berkelanjutan dan berinovasi. Dengan menghasilkan beragam produk organik seperti keripik talas, keripik regedeg, beras, dan tempe, mereka menerapkan metode pertanian lestari dan memanfaatkan sumber daya lokal secara bijak. Komunitas ini bahkan berhasil menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan, seperti penjualan endapan minyak (*blondo*). Inovasi dalam pengemasan dengan menggunakan kardus serta keberhasilan mereka dalam mengirim produk hingga ke Nusa Tenggara Timur mencerminkan komitmen SP Kinasih terhadap tata produksi yang berkelanjutan dan berdampak positif.

Di komunitas KAPPALA, proses produksi kopi terlihat melibatkan praktik unik seperti pengumpulan kopi luwak. Meskipun tradisional, komunitas ini beradaptasi dengan perubahan dinamika lingkungan, seperti perubahan dalam hubungan antara peliharaan anjing dan luwak. Praktik ini mencerminkan upaya komunitas KAPPALA dalam menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelangsungan produksi kopi luwak yang unik dan berkelanjutan. Melalui laporan Wilayah Kelola Rakyat, KAPPALA berharap dapat membagikan pengalaman mereka dalam menjalankan tata produksi yang memperhatikan lingkungan dan merawat keanekaragaman hayati setempat.

Dalam proses pemasaran, fokus utama pada aspek kualitas produk menjadi dasar utama untuk memperkenalkan dan memastikan kepuasan konsumen. Penyortiran produk bukan hanya rutinitas komunitas, tetapi mengikuti prosedur dengan penekanan pada ketahanan produk dan keberlanjutan lingkungan. Keputusan untuk mempertahankan standar kualitas yang konsisten dalam setiap produksi membantu memastikan konsistensi produk yang dihasilkan.

Kualitas produk juga mencerminkan perhatian khusus terhadap bahan baku dan peralatan produksi. SP Kinasih, sebagai contoh, menonjolkan ketahanan produk dengan menggunakan bahan alami seperti daun sirih atau daun pepaya sebagai pengawet alami, mengedepankan

aspek ramah lingkungan. Pemilihan metode manual juga menjadi pilihan untuk memeriksa kualitas dan aspek visual produk secara mendetail, sambil mempertimbangkan efisiensi biaya produksi. Kelompok Tani Karisma dalam pengelolaan produk sale pisang, donat singkong, dan juga ketela. Dalam sistem mereka produk dihasilkan secara organik dan lestari dengan pemanfaatan sungai besar sebagai sumber airnya dan akan menggunakan alternatif sumber air seperti sumur dan air cucian beras bila terjadi kekeringan. Produk yang mereka hasilkan pun bukan hanya kuliner saja tetapi juga hasil pertanian yaitu beras organik menthik susu, menthik wangi, beras merah, beras hitam, kopi, minyak kelapa (VCO), dan juga gula aren.

Cara produksi yang dilakukan oleh komunitas-komunitas tersebut juga mengedepankan aspek lingkungan melalui penggunaan bahan alami dan ramah lingkungan. Hal itu dilakukan melalui proses penyortiran dan *grading* yang teliti menegaskan komitmen komunitas untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi harapan konsumen tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan, memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan sejalan dengan nilai-nilai komunitas dan mendukung pembangunan lokal.

Inovasi dan teknologi menjadi langkah kunci untuk menarik minat konsumen terhadap produk yang dijual dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Teknologi yang dimaksud disini bukan hanya tentang mesin-mesin besar, tetapi lebih kepada teknologi tepat guna yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Komunitas-komunitas terus melakukan inovasi dan mengintegrasikan perkembangan teknologi dalam proses produksi. Komunitas-komunitas ini menciptakan ciri khas yang unik dan berkelanjutan. Inovasi dalam komunitas SP Kinasih tidak hanya terbatas pada pembaharuan produk, tetapi juga mencakup perubahan dalam respons terhadap kebutuhan lingkungan. Mereka beralih dari kemasan plastik ke kardus dan daun pisang kering sebagai langkah menuju produk yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan alat minum yang dapat dipakai ulang juga menjadi bagian dari ino-

vasi ini, sejalan dengan tekad untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Suhartini, salah satu pengurus komunitas SP Kinasih di Kulon Progo, menyatakan, "*Kami menerapkan penggunaan alat minum yang dapat dipakai lagi, misalnya gelas dan bungkus snack menggunakan bahan dari alam seperti daun pisang.*"

Komunitas-komunitas tersebut juga memperluas jenis produksinya. Seperti penggunaan bahan yang dihasilkan sendiri, mereka tidak hanya menghemat biaya produksi, tetapi juga memastikan kualitas dan perawatan optimal sejak awal. Sama halnya dengan YASANTI, yang mengembangkan berbagai inovasi di bidang kuliner dan kerajinan tangan. Dengan memanfaatkan bahan dari lahan mereka sendiri, mereka tidak hanya mengontrol biaya produksi, tetapi juga menjamin kualitas produk sejak awal. Inovasi yang dilakukan membuat komunitas dapat menyesuaikan diri dengan pasar dan mempertahankan posisinya. Penerapan strategi inovasi dan teknologi membuat komunitas-komunitas ini dapat secara fleksibel menyesuaikan diri dengan dinamika pasar. Meskipun menggunakan teknologi yang masih manual dan semi-modern, mereka tetap mempertahankan fokus pada keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini mencerminkan upaya mereka untuk menghadirkan produk yang unik, berkualitas tinggi, dan sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan dalam konteks produksi lokal.

Keberlanjutan lingkungan merupakan suatu upaya atau kemampuan lingkungan dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan lingkungan ini sangatlah penting karena lingkungan yang sehat dan lestari sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lain di bumi.

Berbagai pertimbangan tentang konsep keberlanjutan lingkungan, proses produksi dilakukan oleh kelompok ini dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan sebagai upaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan, yaitu melalui metode tradisional untuk menghindari

dampak kerusakan pada lingkungan. Misalnya, penggunaan bahan-bahan alami sebagai pewarna pada kain, bahan alami sebagai pengawet makanan, dan meminimalisir penggunaan plastik yang dapat merusak lingkungan. Walaupun produk yang dihasilkan belum sepenuhnya alami, namun hal ini sangat patut didukung karena sudah adanya inisiatif dari para kelompok-kelompok tersebut untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Tata konsumsi dalam konteks wilayah kelola rakyat (WKR) merujuk pada cara konsumsi barang dan jasa diatur, dikelola, dan direncanakan dalam lingkup wilayah tersebut. Konsep ini mencakup prinsip-prinsip keberlanjutan, keadilan, dan pemberdayaan masyarakat dalam keputusan konsumsi yang berdampak pada wilayah setempat. Tata konsumsi dalam Wilayah Kelola Rakyat (WKR) menjadi salah satu bagian penting dalam penyesuaian suatu hasil komoditi produk yang dikonsumsi masyarakat yang mana setiap masanya pasti berubah.

Beberapa komunitas di wilayah Yogyakarta memiliki usaha produk lokal yang beragam mulai dari bahan mentah hingga yang sudah siap dikonsumsi atau pakai. Dalam hal ini mereka telah menerapkan strategi distribusi produk yang berinovasi dari waktu ke waktu, seperti mulut ke mulut hingga media sosial (*online*). Promosi yang mereka lakukan ini bermula dengan berpartisipasi dalam acara pameran dari berbagai komunitas yang mereka manfaatkan untuk menawarkan produk. Cara ini mereka dapat lebih dekat untuk mengenalkan produknya secara langsung kepada konsumen. Selain itu, dengan strategi promosi ini mereka harus bisa menyaring target pasar agar penjualan dapat maksimal.

Selain berpartisipasi dalam acara pameran komunitas dan bazar UMKM secara rutin, komunitas juga menjalin kemitraan dengan lembaga daerah, seperti Dinas Koperasi, untuk mendapatkan bantuan finansial, pelatihan, dan promosi melalui kompetisi di tingkat daerah. Dengan strategi promosi yang inovatif, lembaga daerah seperti Dinas Koperasi di Yogyakarta juga memberikan dukungan untuk komunitas itu agar

terus berkembang dengan mengikuti kompetisi di daerah masing-masing supaya tiap kelompok bisa bersaing dan menjadi mandiri di lingkungan mereka.

“Dinas koperasi memiliki beberapa tempat yang bisa dijadikan tempat untuk menitipkan produk jualan para pelaku UMKM. Yang sudah berhasil ikut kurasi akan mendapat kesempatan untuk menaruh produknya disana dengan gratis.” Jelas Arum.

lembaga daerah juga turut serta untuk mendanai komunitas agar mereka juga dapat menetapkan target penjualan dan sekaligus sosialisasi mengenai produk yang dijual. Melalui kesempatan tersebut, anggota komunitas yang berhasil lolos mengikuti kompetisi tersebut akan mendapatkan fasilitas untuk mempromosikan produknya di tempat sentral wisata seperti Malioboro dan Toko Mutiara.

Seiring berkembangnya waktu komunitas-komunitas ini terus berinovasi dengan mempromosikan produk mereka melalui media sosial untuk menjangkau konsumen lebih luas. Melalui promosi di media sosial, komunitas mampu menjangkau konsumen lebih luas tanpa perlu menghabiskan banyak tenaga. Penggunaan platform seperti Facebook, Instagram, dan website komunitas memberikan fleksibilitas dalam memvariasikan pemesanan, termasuk melalui sistem Pre Order (PO) yang membantu menjaga kualitas stok produk. Media online tidak hanya menjadi sarana promosi, tetapi juga alat untuk mengatur penjualan dan menjaga keberlanjutan bisnis. Pemanfaatan peluang promosi online membuat komunitas mampu membangun brand awareness yang kuat, meningkatkan penjualan, dan menciptakan lapangan kerja lokal. Dukungan dari lembaga daerah juga memberikan dorongan positif untuk pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam tata konsumsi aspek kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya ini menjadi perhatian tersendiri untuk komunitas WKR di Yogyakarta. Pada aspek ini mereka dapat menentukan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan penjualan produk

mereka seperti besarnya harga jual, sosial dan ekonomi, dan selera masyarakat. Melalui hal ini beberapa komunitas ada yang menyesuaikan kebiasaan masyarakat sekitarnya seperti menjual bahan makanan atau makanan yang siap konsumsi, contohnya beras merah, beras putih, dan tiwul. Bagi mereka dengan penyesuaian kebutuhan masyarakat setempat menjadi permulaan promosi produk yang mereka jual dalam penjangkauan konsumen dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen di wilayah tersebut.

Kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya, menjadi penentu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan penjualan produk mereka. Faktor-faktor tersebut melibatkan besarnya harga jual, aspek sosial dan ekonomi, serta selera masyarakat. Upaya memahami kebiasaan masyarakat juga tercermin dalam pendekatan harga jual produk. Komunitas mengakui bahwa besarnya harga jual dapat menjadi faktor penentu dalam daya beli masyarakat. Penentuan harga dilakukan dengan cermat dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Tujuannya agar strategi pemasaran dapat lebih efektif dan mampu menjangkau lebih banyak konsumen.

Melalui pendekatan ini, komunitas di Jogja tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen. Mereka berupaya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, memberikan solusi untuk kebutuhan pangan, dan menciptakan produk yang sesuai potensi-potensi yang ada. Produk-produk yang dihasilkan oleh komunitas-komunitas dampingan tersebut menunjukkan bahwa, terdapat keinginan dalam kualitas konsumsi di Yogyakarta. Produk-produk yang dihasilkan merupakan representasi bahwa terdapat pertimbangan faktor-faktor terkait konsumsi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Dokumentasi

YASANTI



Wawancara dengan Ibu Umi Asih selaku perwakilan dari pengurus YASANTI.



Kegiatan perayaan ulang tahun YASANTI yang ke 4 (empat) yang dimeriahkan dengan acara diskusi dan bazar yang diikuti oleh seluruh anggota dampingan YASANTI (Buruh gendong, PAPERJA, PPR, dsb)



Beberapa jenis komoditas dan produk yang dijual di acara bazar dalam rangka ulang tahun YASANTI. Produk yang diperjualkan merupakan produk hasil kreasi dari para anggota.

LSM Kebaya Dampingan PKBI



Wawancara dengan Kak Arum selaku bagian dari LSM Kebaya yang merupakan salah satu dampingan dari PKBI. Kak Arum juga menunjukan produk hasil karya dari teman-teman transpuan di LSM Kebaya yakni buku berjudul 'Solidaritas waria Yogyakarta'. Selain buku juga ada beberapa produk ecoprint seperti kerudung, masker, kaos, dan dompet.



Lokasi dari LSM Kebaya.

SP Kinasih (Petani Kharisma)



Kegiatan Temu Tani dengan tema "Iklim Genting Petani Pontang Panting". Berkenaan dengan Hari Pangan Sedunia, Kelompok Perempuan Petani Lestari Karisma mengajak seluruh anggota untuk hadir bersama-sama untuk memperingati Hari Pangan Sedunia.

Disetiap kegiatan yang diadakan oleh Kelompok Perempuan Petani Lestari Karisma memegang prinsip untuk tidak menghasilkan sampah plastik oleh karena itu digunakanlah gelas kaca dan alas daun pisang untuk peralatan makan dan minum.

Makanan yang disajikan dalam kegiatan ini merupakan hasil dari tanaman para petani Kharisma. Seperti tempe, telur, dan sayur.



AKADEMI **EKOLOGI**

WALHI
WIRAGATA

 **PULIHKAN
JOGJA**

